**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (STUDI
EMPIRIS PADA SELURUH KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2009 – 2013)**

Irfan Anugrah Pangestu¹⁾, Rina Arifati, SE, M.Si, Akt²⁾, Abrar Oemar, SE³⁾,

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

²⁾ Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

³⁾ Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

Abstract

Fiscal decentralization in addition to giving authority to local governments also affect the ability of the region to meet the public interest that this study aims to examine the influence of Economic Growth, PAD, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, DBH of the capital expenditure budget allocation.

The sample used in the study were 29 districts located in Central Java Province taken using census method. The analysis tool used is multiple linear regression test.

Types of secondary and primary data, secondary data in BPS Central Java Province period of 2009 - 2013. Methods using multiple linear regression analysis using SPSS 19.0. Hypothesis testing using t test and f.

Based on the analysis stated that the variable Economic Growth, PAD, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, DBH showed a significant effect on capital expenditures.

Keywords: Economic Growth, PAD, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, DBH, Capital Expenditure.

Abstrak

Pelaksanaan desentralisasi fiskal selain memberikan kewenangan pada pemerintah daerah juga mempengaruhi kemampuan daerah untuk memenuhi kepentingan publik sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 29 Kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Tengah yang diambil dengan menggunakan metode sensus. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi liner berganda.

Jenis data sekunder dan primer, data sekunder di BPS Propinsi Jawa Tengah periode tahun 2009 – 2013. Metode analisis menggunakan regresi liner berganda dengan menggunakan SPSS 19.0. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji f.

Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar

dalam pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk

propinsi maupun kabupaten. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Undang – Undang tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan – kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat Keefer (2003).

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian.

Saragih (2003:69) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan, Dalam Darwanto dan Yustikasari (2007:79) menyatakan menyatakan bahwapertama penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapatan ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut Kuncoro(2004: 28). Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan .

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat

meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Hasil penelitian yang dilakukan Lin (2000:27) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Secara tradisional,

pertumbuhan ekonomi (PE) adalah peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/ PDRB Saragih (2003: 99) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Berarti pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan potensi – potensi lokal untuk kepentingan pelayanan public Mardiasmo,(2002:113).

Penelitian tentang anggaran di pemerintah daerah sesungguhnya telah banyak dilakukan seperti analisis pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi belanja daerah (Studi empirik di wikayah propinsi Jawa tengah dan DIY). Prakosa (2004) dan berkisar pada ada tidaknya *Flypaper Effect* pada PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah (BD) pada kabupaten/kota di Bali (Widodo,2007). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah (BD) Maulinda (2007), meskipun demikian penelitian di Indonesia mengenai Anggaran Daerah, khususnya mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi PAD dan DAU terhadap Anggaran Daerah masih sedikit dilakukan.

Kewenangan yang diberikan tersebut diharapkan mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif dalam pengambilan keputusan disektor pengeluaran publik. Dukungan sumber-sumber keuangan yang sudah ada di Daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Khusus).

Salah satu unsur dari dana Pembangunan adalah Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu,

merupakan program nasional khusus yang dilaksanakan di Daerah. Kegiatan program yang dibiayai. Dana Alokasi Khusus didampingi dengan dana pendamping yang bersumber dari penerimaan umum APBD.

Pada dasarnya penelitian ini merepleksi dari penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007:67) dengan waktu, obyek yang berbeda namun variabel dan alat analisis yang digunakan adalah sama. Penelitian ini berusaha ingin mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan adanya *Research Gap* pada penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah?
- b. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah ?
- c. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah?
- d. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.?
- e. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.?

METODE PENELITIAN

Populasi Sampel & Teknik Pengambilan Sampel

Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari kelompok orang – orang, peristiwa dan hal-hal yang menjadi obyek penelitian yang memiliki standar – standar tertentu dari ciri – ciri yang telah ditetapkan sebelumnya Sekaran (2000:35). Berdasarkan penjelasan diatas, maka menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data keuangan Kabupaten di Jawa Tengah periode Tahun 2009-2013

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti Sutrisno Hadi, (2006: 26).Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sensus adalah metode dengan mengambil seluruh Kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang berjumlah 29 propinsi.

Jenis, Sumber & Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data

Data merupakan fakta empirik yang sudah dikumpulkan oleh peneliti untuk memecahkan masalah/ penjawab pertanyaan penelitian. Jenis data dalam penelitian adalah jenis data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka/ bilangan. Sesuai dengan kriterianya data kuantitatif bisa diolah, dianalisis memakai teknik perhitungan statistik /matematika Arikunto (2011: 89).

Sumber Data

Sumber Data adalah Data yang berdasarkan sumbernya (Sugiyono,2005:89). Data Sekunder dalam penelitian ini adalah: Laporan Realisasi APBD diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id dan laporan Realisasi Tahun 2009 -2013

yang meliputi Jumlah Anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan data. Sekaran (2003:67).

Belanja Modal

Menurut PP Nomer 71 Tahun 2010, belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Boediono (2005). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB } t - \text{PDRB } t-1)}{\text{PDRB } t-1} \times 100 \%$$

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari

sumber – sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha – usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah diukur dengan rumus:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain – lain PAD yang sah}$$

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum untuk masing – masing seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dilihat pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi- tanggung jawab dan

akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi DAK Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari dana perimbangan untuk mengetasi ketimpangan vertikal yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebgayaan penerimaan perpajakan (nasional) dan penerimaan sumber daya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi DBH Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.

Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari datapenelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal. Dilihat dari nilai minimum dan maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi dengan program SPSS Versi 19 Ghozali (2005 :29).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal Agung (2005: 18). Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui normal *probability plot* dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya Ghozali(2005: 79). Selain itu untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal Ghozali, (2005: 67).

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi :

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model Agung(2005:58). Selain itu deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas. $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson (Durbin-Watson Test)*, yaitu untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai *d* statistik. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik *Durbin Watson (DW test)*. Jika nilai Durbin. Watson berada diantara -2 sampai + 2 berarti tidak ada autokorelasi Agung (2005: 67).

Tabel 3.1
Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Jika	Keputusan
$d \leq d_l$	Terjadi masalah autokorelasi yang positif dan perlu diperbaiki
$d_l < d < d_u$	Ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana penarikan akan lebih baik
$d_u < d < d_u$	Tidak ada masalah autokorelasi
$4 - d_u < d < 4 - d_l$	Masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik.
$4 - d_l < d$	Masalah autokorelasi serius

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakpastian varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Cara mendeteksinya dengan *Uji Glejser*.

Pengujian heteroskedastisitas dengan metode lazim dipergunakan meskipun menimbulkan bias, karena pengamatan antara satu dengan mengamati lain bisa menimbulkan perbedaan persepsi. Oleh karena itu, penggunaan Uji Statistik diharapkan menghilangkan unsur bias tersebut. *Uji Glejser* dilakukan dengan meregresikan variabel – variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya Gujarati (2004 :128).

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen Sekaran(2006:68). Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$BM = \alpha + \beta_1 PE + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + \beta_4 DAK + \beta_5 DBH$$

Dimana:

Y = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

β = Slope atau Koefisien Regresi

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

e = Error

Pengujian Hipotesis

Secara statistik, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual dapat diukur dengan nilai statistik t, nilai statistik F, serta koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima Ghazali, (2005).

Uji Model

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterkaitan antar variabel dependen dan

variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*) Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu Ghozali, (2005). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghozali(2005: 79).

Uji F Statistik

F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan.

Jika model signifikan maka model bisa digunakan untuk prediksi/peramalan, sebaliknya jika non/tidak signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan untuk peramalan.

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F hitung > dari F tabel, (Ho di tolak Ha diterima) maka model signifikan atau bisa dilihat dalam kolom signifikansi pada Anova (Olahan dengan SPSS, Gunakan Uji Regresi dengan Metode Enter/Full Model). Model signifikan selama kolom signifikansi (%) < Alpha (kesiapan berbuat salah tipe 1, yang menentukan peneliti sendiri, ilmu sosial biasanya paling besar alpha 10%, atau 5% atau 1%). Dan sebaliknya jika F hitung < F tabel, maka model tidak signifikan, hal ini juga ditandai nilai kolom signifikansi (%) akan lebih besar dari alpha.

Pengujian Parsial (Uji statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing

variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian parsial digunakan uji t. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada derajat kepercayaan 5%. Pengujian ini menggunakan Kriteria Ho: $\beta=0$ artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Ho: $\beta\neq 0$ artinya ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika t hitung lebih kecil t tabel maka Ho diterima dan H1 ditolak. Dan sebaliknya, jika t hitung lebih besar t tabel maka Ho ditolak dan H1 diterima (Ghozali, 2005).

Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterkaitan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu Ghozali(2005). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghozali (2005).

HASIL PEMBAHASAN

Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat. Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 Km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan

(dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan KarumunJawa di Laut Jawa.

Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya kadang juga mencakup wilayah Daerah Isitimewa Yogyakarta Jawa Tengah dikenal sebagai “jantung budaya Jawa. Meskipun demikian di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat. Selain ada pula warga Tionghoa- Indonesia, Arab – Indonesia dan India – Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi ini.

Jawa Tengah sebagai provinsi dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Hingga 1905 , Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah (*gewesten*) yakni Semarang, Rembang, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan, Surakarta masih merupakan daerah swapraja kerajaan (*vorstenland*) yang berdiri sendiri dan terdiri dari dua wilayah, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegara, sebagaimana Yogyakarta. Masing – masing *gewest* terdiri atas kabupaten-kabupaten. Waktu itu Rembang *gewest* juga meliputi *Regentshap* Tuban dan Bojonegoro.

Setelah diberlakukannya *Decentralisatie Besluit* tahun 1905, *gewesten* diberi ekonomi dan dibentuk Dewan Daerah. Selain itu juga dibentuk *gemeente* (kotapraja) yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga , dan Magelang.

Sejak tahun 1930, provinsi diteatpkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi *Provinciate Road*. Provinsi terdiri atas beberapa karesidenan *resident*, yang meliputi beberapa kabupaten *regentshap*, dan dibagai lagi dalam beberapa kewedanan *distric*). Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 karesidenan, yaitu :Pekalongan, Jepara-Rembang, Semarang , Banyumas, dan Kedu.

Menyusul kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1946 Pemerintah membentuk daerah swapraja Kasunanan

dan Mangkunegaran; dan dijadikan karesidenan. Pada tahun 1950 melalui Undang –Undang ditetapkan pembentukan kabupaten dan kotamadya. Penetapan Undang – Undang tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, yakni tanggal 15 Agustus 1950. Secara administrative, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Sebelum diberlakunya Undang – Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 4 kota administrative, yaitu Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, dan Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonom Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten.

Menyusul otonom daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Kota Mungkid). Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (BM) yang dapat dilihat dari dimensi peneliti gunakan untuk mengukur yaitu :

Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BE)dengan nilai koefisien regresi 0.115 dan memberikan nilai t hitung sebesar 1,077 dan dengan nilai

signifikansi sebesar 0.004 dimana lebih kecil dari 0.05 ($\alpha = 5\%$) maka hipotesa pertama menyatakan pengaruh positif dan signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BE) dengan nilai koefisien regresi 0.241 dan memberikan nilai t hitung sebesar 2,252 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0.003 dimana lebih kecil dari 0.05 ($\alpha = 5\%$) maka hipotesa pertama menyatakan pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BE) dengan nilai koefisien regresi 0.027 dan memberikan nilai t hitung sebesar 1,254 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 dimana lebih kecil dari 0.05 ($\alpha = 5\%$) maka hipotesa pertama menyatakan pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BE) dengan nilai koefisien regresi 0,342 dan memberikan nilai t hitung sebesar 1,220 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0.002 dimana lebih kecil dari 0.05 ($\alpha = 5\%$) maka hipotesa pertama menyatakan pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BE) dengan nilai koefisien regresi 0,118 dan memberikan nilai t hitung sebesar 1,2250 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 dimana lebih kecil dari 0.05 ($\alpha = 5\%$) maka hipotesa pertama menyatakan pengaruh positif dan

signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

Pemerintah Daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada Pemerintah Pusat bisa dikurangi.

Pemerintah Daerah harus lebih dapat mengefisienkan jumlah pegawai yang dimilikinya dengan cara lebih fokus pada kualitas pegawai daripada kuantitasnya dan pemanfaatan teknologi, dengan begitu diharapkan Pemerintah bisa lebih menekan anggaran belanja pegawai yang selama ini menjadi pengeluaran terbesar Pemerintah.

Penghapusan honor belanja pegawai yang melekat pada pos belanja langsung atau lebih spesifik pada belanja modal dapat lebih mengefisienkan pengeluaran belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2004. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah* : Pendekatan *Principal-Agent Theory*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, 4-5 Oktober 2004. Syukriy & Abdul Halim. 2004. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah". *Simposium Nasional Akuntansi VI*, hal. 1140-1159
- Basry, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Bratakusuma, Sholikin. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Brodjonegoro, Bambang dan Nurkholis.2003. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian Antar Daerah:Analisa Model IRIO, Indonesia.*Journal of Economic and Development*.Vol. 3 No. 2.Januari2003, KANOPI(Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia) UniversitasIndonesia.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2006. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadapPengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Simposium Nasional AkuntansiX*. Editorial Media Indonesia.*Menggenjot Belanja Modal*.25 Agustus 2008.
- Ghozali, Imam.2006. *Statistik Multivariat SPSS*.Penerbit BP UniversitaDiponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Penerbit UPP AMP YKPN.Yogyakarta.
- _____. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat.
- Hamzah, 2007. "Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran".*Simposium Akuntansi &Keuangan Sektor Publik Pertama Pasca Sarjana* UPN Veteran. Surabaya.
- Hari Adi, Priyo. 2006. "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah".*Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Indriantoro, Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Keefe, Philip & Stuti Khemani. 2003. *The Political Economy of Public Expenditures*.*Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People*.The World Bank.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. *Economic Development and Cultural Change Chicago*.Vol. 49.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nordhaus, Samuelson. 1992. *Mikro Ekonomi*. Edisi Keempatbelas. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Santoso, Singgih.2002. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta
- Saragih, Juli Panglima.2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*.Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sidik, Macfud & Robert Simanjutak. 2002. *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*.Penerbit Buku Kompas.Jakarta.
- Stine, William F. 1994. *Is Local Government Revenue Response to Federal Ai Symmetrical? Evidencefrom Pensiylvania Country Government in an Era of*

Retrenchment. *National Tax Journal*, Vol. 47 No. 4.

Sukirno, Sadono. 1991. *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Kebijaksanaan*. Penerbit FE-UI dan Bina Grafika. Jakarta.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Daerah